

**PANDANGAN UMUM FRAKSI
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(PDI PERJUANGAN)
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2027**



**PDI
PERJUANGAN**

**DISAMPAIKAN
DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN KEBUMEN
PADA HARI KAMIS, 10 SEPTEMBER 2026**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu,

Namo Buddhaya, Salam Kebajikan,

MERDEKA !!!

Yth. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna sekaligus Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan para anggota DPRD Kabupaten Kebumen;

Ysh. Bupati dan Wakil Bupati Kebumen;

Ysh. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen, Para Asisten Setda, Para Staf Ahli Bupati Kebumen, Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, Ketua dan Sekretaris KPU, Ketua Bawaslu, Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Kebumen, Camat se-Kabupaten Kebumen, Pimpinan BUMD, Direktur RSDS dan Direktur RSUD Prembun;

Ysh. Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen dan seluruh jajarannya.

Ysh. Hadirin dan segenap Undangan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen, para wartawan dari berbagai media cetak, serta segenap warga masyarakat Kabupaten Kebumen di manapun berada yang menangkap siaran Rapat Paripurna ini melalui siaran Radio In FM maupun Kebumen TV yang berbahagia

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;

Pertama-tama marilah kita bersama panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir dan mengikuti Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi atas Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027.

Sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita semua termasuk golongan yang mendapatkan syafaatnya nanti di Yaumul Akhir. Amienn....

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;

Dalam kesempatan ini, izinkan kami atas nama **Fraksi PDI Perjuangan** DPRD Kabupaten Kebumen mengucapkan terima kasih kepada :

- a. *Pertama*, Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen yang telah memberikan kesempatan kami mewakili Fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan pandangan umum atas Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027;
- b. *Kedua*, Bupati Kebumen yang telah menyampaikan Rancangan Perda ini kemarin;

- c. *Ketiga*, Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen dan seluruh jajarannya yang telah membantu memfasilitasi Rapat Paripurna ini.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;

Selanjutnya, terkait Rancangan Perda dan Nota Keuangan ini, **Fraksi PDI Perjuangan** menyampaikan pandangan umum sebagai berikut:

1. **Fraksi PDI Perjuangan** mencermati bahwa Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp3,016 triliun, sedangkan Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar Rp582,76 miliar dari total pendapatan daerah. Namun demikian, kami memberikan perhatian serius karena PAD Tahun 2027 justru diproyeksikan mengalami penurunan dibandingkan APBD Tahun 2026. Bahkan target Pajak Daerah mengalami penurunan sebesar 0,40%. Atas kondisi tersebut kami meminta penjelasan:
 - a. Apa yang menjadi dasar perhitungan dan argumentasi Pemerintah Daerah dalam menetapkan target Pajak Daerah Tahun 2027 lebih rendah dibandingkan Tahun Anggaran 2026?
 - b. Apakah penurunan target tersebut merupakan akibat dari menurunnya potensi ekonomi masyarakat, perubahan regulasi, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, atau justru belum optimalnya sistem pendataan dan pengawasan objek pajak?

- c. Apakah Pemerintah Daerah telah melakukan pemetaan secara menyeluruh terhadap potensi pajak daerah, khususnya objek pajak baru yang berkembang seiring pertumbuhan sektor perdagangan, pariwisata, perhotelan, restoran, hiburan dan sektor ekonomi lainnya?
 - d. Apakah OPD penghasil sudah menjalankan fungsinya secara maksimal, bila belum apakah di dalamnya terjadi permasalahan? ataukah SDM yang kurang kompeten atau kebijakan yang harus dibenahi? Apakah bisa, guna melakukan penyegaran terkait OPD yang tidak memenuhi target dilakukan mutasi promosi bahkan diberikan sanksi?
2. Terkait dengan pendapatan daerah, pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 sebagian besar masih bergantung pada sumber pendanaan dari pemerintah pusat dengan proporsi sebesar 80,68%. Adapun PAD terhadap pendapatan daerah mencapai 19,32% dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 0,00% dari pendapatan daerah. **Fraksi PDI Perjuangan** memandang bahwa APBD kita masih menunjukkan ketergantungan pada pemerintah pusat, hal ini menjadi PR besar untuk kita semua. Ketergantungan yang tinggi menunjukkan kemandirian fiskal Kabupaten Kebumen masih perlu untuk dioptimalkan. Di samping itu, kami memandang masih

banyaknya potensi pendapatan yang belum tergali sehingga kami meminta bentuk keseriusan antara pemerintah daerah selaku pemangku dan pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, strategi apa yang akan dilakukan Pemerintah Daerah dalam jangka menengah dan jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer? dan Bagaimana target peningkatan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah selama periode RPJMD 2025–2029? Mohon Penjelasan.

3. Tema pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2027 adalah:
"Pemenuhan Infrastruktur dalam rangka Penguatan Aksesibilitas Pelayanan Dasar dan Pengembangan Pariwisata Guna Percepatan Penanggulangan Kemiskinan". Tema tersebut harus diwujudkan dalam struktur belanja yang benar-benar berpihak kepada masyarakat. **Fraksi PDI Perjuangan** meminta penjelasan terkait :
 - a. Bagaimana korelasi secara langsung antara alokasi belanja RAPBD Tahun Anggaran 2027 dengan target penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen?
 - b. Apakah setiap program penanggulangan kemiskinan telah berbasis pada data yang akurat dan terpadu agar tidak terjadi salah sasaran maupun tumpang tindih program?

c. Apakah alokasi belanja RAPBD 2027 bila ada yang tidak sesuai dengan tema pembangunan bisa dirubah atau bahkan hanya pemaparan program dan pergeseran anggaran merupakan keputusan tetap?

4. **Fraksi PDI Perjuangan** mencermati masih tingginya beban Belanja Pegawai dalam struktur APBD Kabupaten Kebumen. Di tengah kebutuhan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik yang sangat besar, ruang fiskal Pemerintah Daerah harus dikelola secara hati-hati. Kami mempertanyakan:

a. Bagaimana strategi Pemerintah Daerah dalam menjaga keseimbangan antara Belanja Pegawai dengan Belanja Pelayanan Publik dan Belanja Pembangunan?

b. Bagaimana proyeksi kebutuhan anggaran untuk PPPK dan PPPK Paruh Waktu dalam beberapa tahun ke depan?

5. Terkait pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 kondisi anggaran pembiayaan terdapat defisit sebesar 111 Milyar lebih yang ditutup dari perkiraan penerimaan pembiayaan yang terdiri dari asumsi SiLPA Tahun 2026 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah. **Fraksi PDI Perjuangan** memberi perhatian atas defisitnya RAPBD Tahun Anggaran 2027, lantas bagaimana

pengelolaan APBD kedepan, terutama dalam penetapan skala program-program prioritas, mohon penjelasannya.

6. **Fraksi PDI Perjuangan** meminta bahwa perlu adanya konsistensi antara tema kebijakan dan penentuan pagu anggaran pada setiap organisasi perangkat daerah yang dicapai melalui penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang terstruktur sehingga alokasi dana di setiap OPD sejalan dengan prioritas daerah. **Kami** juga meminta agar pemerintah daerah dapat memaksimalkan aspirasi masyarakat yang dihimpun oleh DPRD melalui reses sehingga RAPBD Tahun Anggaran 2027 dapat terserap semua dengan mengedepankan kepentingan rakyat dalam pengentasan kemiskinan.
7. **Fraksi PDI Perjuangan** berharap bahwa penyusunan Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2027 tentu menjadi matrantai dari penyusunan APBD tahun sebelumnya jangan hanya dijadikan sebagai proses dalam menaikkan atau menurunkan anggaran melainkan harus dijadikan sebagai langkah awal yang pada hakikatnya dapat meningkatkan kesejahteraan melalui ketahanan pangan masyarakat, menjamin infrastruktur dan tata ruang yang ramah lingkungan, pemerataan perekonomian, peningkatan kualitas pendidikan, serta sistem birokrasi yang sifatnya melayani dan punya kepekaan serta responsif.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Demikian penyampaian Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027. Kepada seluruh pihak terkait yang nanti akan membahas Raperda ini kami ucapkan selamat bekerja, kami berpesan agar dalam pembahasannya nanti dapat lebih detail menyelami pasal per pasal dan lampiran demi lampirannya, agar terhindar dari kekeliruan-kekeliruan angka dan kata. Kami mendorong agar pembahasan nantinya dapat segera dirampungkan agar roda pembangunan daerah dapat terus berputar. Selanjutnya, atas tutur kata dan sikap yang kurang berkenan selama penyampaian ini, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya.

Billahi Taufik Wal Hidayah,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

MERDEKA !!!

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

KETUA

BAMBANG SUTRISNO, SE



SEKRETARIS

SUGENG WIBAWA

